

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyusun Renja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

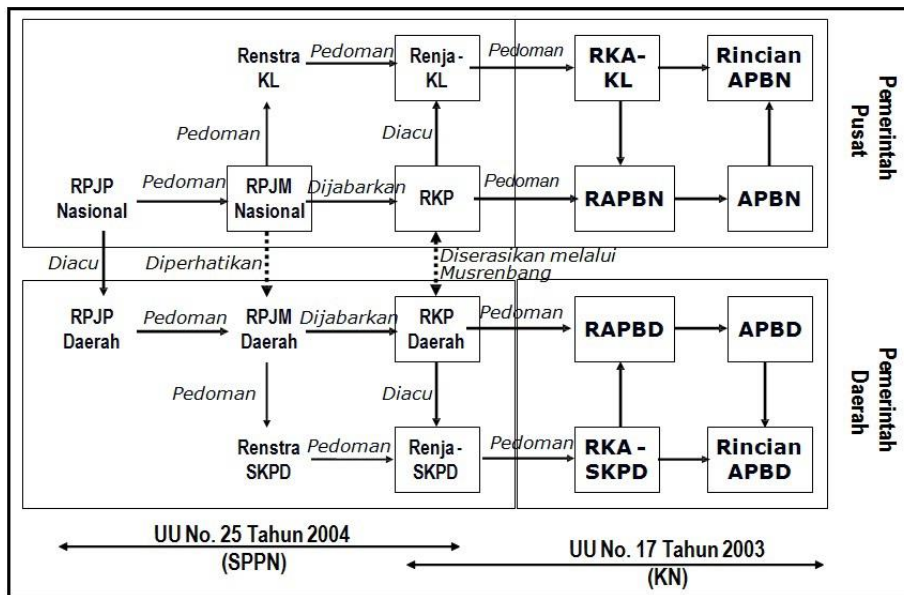
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

- Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
  - p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
  - q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
  - r. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor .... );
  - s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II.**  
**HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**  
**2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Detasemen Polisi sesuai Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Pada tanggal 10 November 1948, sesuai dengan Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948 berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

3. Pada tanggal 3 Maret 1950 wilayah Jawa dan Madura dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.
4. Pada tahun 1962 diubah menjadi Kesatuan Pagar Baya sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 .
5. Pada tahun 1963 istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) (8) = (7)/(6)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78 Angka	81,58 Angka	104,59%
	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang /Bulan	42 Orang /Bulan	100%
		Jumlah Orang yang Menerima TPP	42 Orang /Bulan	42 Orang /Bulan	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%



SKPD				
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	232 orang	232 orang	100%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100%

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**)</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	100%	100%	100%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Laporan intel kewilayahan	300 Kasus	300 Kasus	100%
		12 Laporan	12 Laporan	100%

	Laporan patroli kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Laporan pengamanan kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Laporan pengawalan pejabat	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Laporan pengendalian operasi kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Patroli kewilayahan	288 Kali	288 Kali	100%
Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Kasus	313 Kasus	n/a
	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	99 orang	99 orang	100%
	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 Orang	100 Orang	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	100%

dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	100%
Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Laporan sidang	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Laporan yustisi dan non yustisi	4 Laporan	4 Laporan	100%
<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan</b>	<b>Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga</b>	27,22%	27,22%	100%

**Kebudayaan**

**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**

**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**

Pembinaan Jagawarga

Pembentukan kelompok Jagawarga

262 pedukuhan

262 pedukuhan

100%

n/a

n/a

n/a

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	-	-

Commented [L1]: Mohon disesuaikan dgn tabel 2.1

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah  Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah  Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan  Sub kegiatan pelaksanaan penataan usaha dan pengkajian/verifikasi keuangan spd	Ketersediaan anggaran dan SDM
3.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan

	anggaran dan SDM
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas serta atribut kelengkapannya	
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
Sub kegiatan pemeliharaan mesin lainnya	
Sub kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi saran dan prasana Gedung kantor atau bangunan lainnya	
7. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Ketersediaan anggaran dan SDM
Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
Sub kegiatan penjegah gangguan trantibum melalui deteksi dini cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	
Sub kegiatan penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan pengamanan unjuk rasa dan kerusakan masa	
Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka trantibum	

Sub kegiatan peningkatan kapasitas sdm satpol pp dan linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia  
Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rantibum  
Kegiatan penegakan perda  
Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda  
Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran Perda

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi laporan data tepat waktu;
2. Optimalisasi dukungan kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
3. Optimalisasi personil/SDM yang memadai;
4. Kajian penyempurnaan Perda; dan
5. Sinergitas OPD dan stakeholder terkait

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Datasemen Polisi sesuai Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang



Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Pada tanggal 10 November 1948, sesuai dengan Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948 berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
3. Pada tanggal 3 Maret 1950 wilayah Jawa dan Madura dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.
4. Pada tahun 1962 diubah menjadi Kesatuan Pagar Baya sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962.
5. Pada tahun 1963 istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Ka  
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1	Persentase Penegakan Perda	78%	78%	69%	70%	70%	70%	72%	
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Keterangan:

\*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Satuan Polisin Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
  - a. NIHIL
  - b. ....
  - c. dst

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. NIHIL
- b. ....
- c. dst

2. IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Persentase Penegakan Perda
- b. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memiliki mandat dalam melaksanakan ketugasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.
- b. Optimalisasi jumlah personil yang tersedia untuk pelaksanaan tugas
- c. Optimalisasi anggaran tahun 2021

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Memiliki mandat dalam melaksanakan ketugasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP	Kurangnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP sebagai upaya tindak lanjut dari pelanggaran Perda
Optimalisasi jumlah personil yang tersedia untuk pelaksanaan tugas	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas
Optimalisasi anggaran tahun 2021	Keterbatasan anggaran tahun 2021 untuk mendukung semua kinerja Satpol PP

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
1. Peningkatan Kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	1. Penguatan Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah dengan menambah jumlah PPNS Satpol PP
	2. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dirancang kegiatan diklat yang berkaitan dengan kompetensi Satpol PP seperti diklat dasar yang di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah NO.6 tahun 2010 tentang Satpol PP. Adapun macam diklat yang antara lain diklat intel, diklat provos, dan jabatan profesional
2. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait sehingga pelanggaran-pelanggaran bisa diantisipasi sejak awal
3. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga trantibum dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran trantibum

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	<b>8,968,367,603</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	<b>8,968,367,603</b>	
	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	<b>25,402,500</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	<b>25,402,500</b>	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,877,500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,877,500	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18,525,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18,525,000	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	<b>7,777,624,715</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	<b>7,777,624,715</b>	
	Sub Kegiatan	Kab.	Jumlah Orang	50 Orang	6,084,286,315	Sub Kegiatan	Kab.	Jumlah Orang	50 Orang	6,084,286,315	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	/Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	/Bulan		
		Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima TPP	50 Orang /Bulan			Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima TPP	50 Orang /Bulan		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1,693,338,400	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1,693,338,400	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	<b>215,815,000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	<b>215,815,000</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	116,475,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	116,475,000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 orang	99,340,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 orang	99,340,000	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	<b>226,088,976</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	<b>226,088,976</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	148,370,976	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	148,370,976	

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	77,718,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	77,718,000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	12 Laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah	12 Laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah	12 Laporan		
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>20,000,000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>20,000,000</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10,000,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	
	<b>Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>355,544,162</b>	<b>Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>355,544,162</b>	
	Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	355,544,162	Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	355,544,162	



	Kantor		Kantor yang Disediakan			Kantor		Kantor yang Disediakan			
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	100%	<b>347,892,250</b>	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	100%	<b>347,892,250</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	317,925,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	52 Unit	317,925,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	12,700,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	12,700,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17,267,250	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17,267,250	
	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**)</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	100%	<b>2,168,766,777</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**)</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	100%	<b>2,168,766,777</b>	
	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan</b>	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran kantrantibmas	100%	<b>1,788,737,350</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran kantrantibmas	100%	<b>1,788,737,350</b>	

	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		yang ditindaklanjuti			Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		yang ditindaklanjuti			
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Kasus	1,091,426,800	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Kasus	1,091,426,800	
			Laporan intel kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan intel kewilayahan	12 Laporan		
			Laporan patroli kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan patroli kewilayahan	12 Laporan		
			Laporan pengamanan kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pengamanan kewilayahan	12 Laporan		
			Laporan pengawasan pejabat	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pengawasan pejabat	12 Laporan		
			Laporan pengendalian operasi kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pengendalian operasi kewilayahan	12 Laporan		
			Patroli kewilayahan	288 Kali			Kab. Bantul	Patroli kewilayahan	288 Kali		
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman	300 Kasus	320,476,800	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman	300 Kasus	320,476,800	

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
		Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	12 Laporan		
		Kab. Bantul	Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	12 Laporan		
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	290,716,800	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	290,716,800	
		Kab. Bantul	Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	99 orang			Kab. Bantul	Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	99 orang		
		Kab. Bantul	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 Orang			Kab. Bantul	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 Orang		
	Sub Kegiatan Peningkatan	Kab. Bantul	Jumlah SDM Satuan Polisi	100 Orang	80,116,950	Sub Kegiatan Peningkatan	Kab. Bantul	Jumlah SDM Satuan Polisi	100 Orang	80,116,950	

	Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	6,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	6,000,000	
	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanj</b>	100%	<b>380,029,427</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanj</b>	100%	<b>380,029,427</b>	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan	8,500,000	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan	8,500,000	
	Sub Kegiatan	Kab.	Jumlah Laporan	12 Laporan	73,717,500	Sub Kegiatan	Kab.	Jumlah Laporan	12	73,717,500	

	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Bantul	Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Bantul	Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
		Kab. Bantul	Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen			Kab. Bantul	Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen		
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	297,811,927	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	297,811,927	
			Laporan sidang	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan sidang	12 Laporan		
			Laporan yustisi dan non yustisi	4 Laporan			Kab. Bantul	Laporan yustisi dan non yustisi	4 Laporan		
	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga</b>	45,44%	<b>450,000,000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga</b>	45,44%	<b>450,000,000</b>	
	<b>Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	Kab. Bantul	<b>Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di</b>	327 pedukuhan	<b>450,000,000</b>	<b>Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	Kab. Bantul	<b>Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di</b>	327 pedukuhan	<b>450,000,000</b>	

			<b>Pedukuhan</b>					<b>Pedukuhan</b>						
	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Pembentukan kelompok Jagawarga	45 pedukuhan	450,000,000	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Pembentukan kelompok Jagawarga	45 pedukuhan	450,000,000				
Jumlah					<b>11.587.134.380</b>	Jumlah					<b>11.587.134.380</b>			Kab. Bantul

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para PemangkuKepentingan/Masyarakat  
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**)</b>	Kab.Bantul	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bantul	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab.Bantul	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	Rp. 45.000.000	

	Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Ditingkatkan Kapasitasnya		
--	---	--	---------------------------	--	--

*→ narasibagi OPD yang memiliki usulan masyarakat pada musrenbang kecamatan atau usulan para pemangku kepentingan*



### **BAB III.**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen pemerintah terhadap penegakan Perda
2. Implementasi penegakan perda dengan melibatkan stakeholder
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah “Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

- Pemantapan Layanan Publik **berbasis teknologi informasi**
- Peningkatan Kualitas **Sumber Daya Manusia**
- Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui **pemberdayaan UMKM**
- Peningkatan kualitas **sector pertanian, industri dan pariwisata**
- Peningkatan **infrastruktur pendukung ekonomi** dan **permukiman sehat** berbasis pengurangan risiko bencana.
- Pemberdayaan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, Pengarusutamaan **Gender**, Peningkatan Status **Kabupaten Layak Anak**.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada peraturan daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya implemementasi Perda	Presentase penegakan Perda	100%
			Presentase penanganan trantibum yang di tindak lanjuti	100%

**BAB IV.**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	5				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					11,385,020,680			13,642,055,737				
1	5	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					10.792.973.698			11.030.515.882				
1	5	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					30.749.125			33.824.037				
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen	100 persen	8.333.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	100 persen	9.167.262
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	22.415.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	100 persen	24.656.775
1	5	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					9.214.654.539			9.056.822.625				
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50 Orang/bulan	100 persen	7.155.244.335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	7.155.244.335
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 dokumen	100 persen	2.059.410.204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.901.578.290
1	5	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					301.078.250			331.186.075				
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	140.934.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	155.028.225
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	235 Orang	100 persen	160.143.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	176.157.850
1	5	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					263.645.039			292.009.542				

1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 persen	140.758.07	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	134.878.881
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	5.000.000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	117.436.965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	151.680.661
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 persen	450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	450.000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>20.000.000</b>					<b>20.000.000</b>	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Unit	100 persen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	10.000.000
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	100 persen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	10.000.000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>427.739.673</b>					<b>470.513.640</b>	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	427.739.673	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	470.513.640
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>535.107.072</b>					<b>588.617.779</b>	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	52 unit	100 persen	458.846.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	508.731.370
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	40 Unit	100 persen	15.367.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	16.903.700

1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	100 persen	20.893.372	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	22.982.709		
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>4.887.460.448</b>						<b>2.541.472.297</b>	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>4.328.280.135</b>							<b>1.976.423.909</b>
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Kasus	100 persen	3.338.274.954	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	1.087.418.211		
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Kasus	100 persen	416.526.928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	358.329.620		
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 persen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500.000		
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 persen	443.405.803	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	407.796.383		
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 persen	113.552.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	104.907.695		
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 persen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500.000		
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 persen	14.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	15.972.000		

1	5	2	2.01	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 persen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500.000	
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 persen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500.000	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>							<b>558.680.353</b>				<b>564.548.388</b>		
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	17.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	17.000.000	
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	104.439.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	105.683.175	
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	437.241.103	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	441.865.213	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>							<b>500.000</b>				<b>500.000</b>		
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100 persen	500.000	
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					100 persen					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100 persen
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>2</b>	<b>22</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>2.500.000.000</b>				<b>3.500.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>8</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>							<b>2.500.000.000</b>				<b>3.500.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>5.07</b>		<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>							<b>2.500.000.000</b>				<b>3.500.000.000</b>		
2	22	8	5.07	12	Pembinaan Jagawarga	Terbentuknya kelompok jaga warga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina		45 dusun	3750 Orang	3750 dusun	2.500.000.000	Dana Keistimewaan	Terbentuknya kelompok jaga warga	45 dusun	3.500.000.000	
<b>TOTAL</b>													<b>11,835,020,680</b>				<b>16,142,055,737</b>	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra PD dan Renja PD sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
V. SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	1.05.02.2.01.01 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300 Kasus	1.071.392.831	Satpol PP
				1.05.02.2.01.02 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Kasus	378.524.480	Satpol PP
				1.05.02.2.01.03 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000	Satpol PP



			1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	403.050.730	Satpol PP
			1.05.02.2.01.05 Peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	103.229.500	Satpol PP
			1.05.02.2.01.06 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	500.000	Satpol PP
			1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	13.200.000	Satpol PP
			1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	PrasaranaKetenteraman dan KetertibanUmum yang TersediaJumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	500.000	Satpol PP
			1.05.02.2.01.09 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	500.000	Satpol PP

				1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	17.000.000	Satpol PP
				1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	85.217.500	Satpol PP
				1.05.02.2.02.03 penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	405.673.730	Satpol PP
				1.05.02.2.03.01 Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 laporan	500.000	Satpol PP

**BAB V.**  
**PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANTUL,

YULIUS SUHARTA, S.Sos., M.Si  
NIP. 196707211995031002

